

# Aset Belum Genah

**PONTIANAK** - Opini wajar dengan pengecualian yang diterima pemprov Kalbar dari Badan Pemeriksa Keuangan menambah urgen pembentukan panitia khusus aset. Apalagi saat menyampaikan sambutan, Anggota Komisi VI BPK RI Rizal Djalil juga sudah menegaskan tentang penataan dan manajemen aset.

"Masalah aset menjadi kendala sehingga pemprov tidak bisa meraih opini wajar tanpa pengecualian," kata Ketua Komisi A DPRD Kalbar, Retno Pramudya, kemarin. Menindaklanjuti persoalan ini, Kamis (21/7), Komisi A kembali melayangkan surat kepada Ketua DPRD Kalbar. Surat itu bermaksud meminta penjelasan dari Ketua DPRD terkait dengan usul pembentukan pansus yang belum ditindaklanjuti.

• ke halaman 15 kolom 2

## Sambungan dari halaman 9

Sebelumnya, pembentukan Pansus Aset atau yang belakangan disebut Pansus Sistem Penataan dan Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah sudah diusulkan kepada Ketua DPRD Kalbar. Usul tersebut disampaikan dua kali. Surat pertama tertanggal 22 Februari 2011. Kemudian, surat kedua disampaikan pada 31 Mei 2011. Usul itu telah ditandatangani 21 Anggota DPRD dari semua fraksi.

"Kita kembali melayangkan surat ketiga kalinya tertanggal 21 Juli 2011, dan minta kepada pimpinan dewan khususnya Ketua DPRD untuk memberikan penjelasan kenapa sampai saat ini tidak direspon," tegas politisi PPP ini.

Menurut Retno, penekanan tentang manajemen aset yang telah disampaikan Anggota Komisi VI BPK RI, Rizal Djalil dalam rapat paripurna istimewa DPRD kemarin dinilai perlu diperhatikan. Penekanan BPK itu juga menegaskan bahwa masalah manajemen aset patut diprioritaskan. Apalagi, selama ini memang terdapat berbagai permasalahan seputar aset yang terjadi di pemprov.

Masalah itu antara lain terkait dengan regulasi yang mengatur tata kelola aset tetap. Selain itu, regulasi yang ada yakni PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan untuk Pemda,

serta Permendagri Nomor 17 tahun 2007 juga belum dapat diaplikasikan secara optimal. Akibatnya, tidak dapat dilakukan proses kapitalisasi atas biaya yang memenuhi kriteria penambahan nilai aset tetap sebelumnya.

"Kinerja beberapa unit SKPD dalam tata kelola aset juga masih rendah, mulai dari inventarisasi, kodefikasi dan labelisasi aset, pengarsipan aset, pemeliharaan dan pengamanan, pengawasan serta pengelolaannya dalam meningkatkan pendapat asli daerah," ujarnya. Karena itu, Retno menilai ada banyak cukup alasan bagi DPRD untuk melakukan pembahasan dan pengkajian tentang masalah aset secara lebih mendalam melalui pansus.

Wakil Ketua DPRD, Prabasa Anantatur dan Ahmadi Usman juga menyatakan sepemendapat. Keduanya sangat mendukung pembentukan pansus. Menurut Prabasa, pansus perlu segera dibentuk agar legislatif dan eksekutif dapat bekerja bersama-sama dalam memperbaiki manajemen aset. "Mudah-mudahan kita bisa bekerjasama membenahi ini sehingga opini BPK kita nanti mendapatkan WTP," katanya diamini Ahmadi.

Laporan Keuangan Pemprov Kalbar Tahun 2010 baru meraih opini wajar dengan pengecualian atau masih sama dengan tahun 2009. Meski predikat

WDP yang diraih pemprov ini sama dengan tahun sebelumnya, kata Prabasa, sebetulnya kinerja pengelolaan keuangan pemprov sudah lebih baik. "Harusnya kita bisa dapat WTP, tetapi masih terkendala persoalan aset, jadi masih WDP," jelas dia mengutip pernyataan BPK. N Terkait dengan ini, Prabasa juga menyinggung tentang persoalan aset KONI. Masalah tersebut dinilai menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam upaya memperbaiki manajemen aset. Sayangnya, kata dia, sampai sekarang pemprov atau eksekutif masih belum memberikan jawaban terhadap surat dari legislatif.

Padahal, legislatif telah tiga kali menyurati eksekutif guna meminta penjelasan tentang kerjasama yang dilakukan pemprov dengan pihak ketiga di atas lahan tersebut. Surat terakhir ditandatangani Wakil Ketua DPRD, Nicodemus R Toun, Rabu (20/7).

Dalam surat ini, eksekutif diberikan waktu tujuh hari untuk menyampaikan balasan. Prabasa menyarankan Biro Hukum serta Biro Keuangan dan Pengelolaan Aset yang dibawah koordinasi Sekretaris Daerah dapat segera mengkaji ulang kerjasama itu karena terindikasi menyalahi prosedur. Selain itu, eksekutif juga diharapkan segera menyampaikan surat balasan berikut dokumen-dokumen sebagaimana diminta legislatif. (rnl)